

KETIMPANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA SISWA SEKOLAH DASAR: STUDI PADA BPBD KABUPATEN BANDUNG

Mutia Ameera¹; Ramadhan Pancasilawan²

^{1,2}*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

email : mutia22006@mail.unpad.ac.id¹; ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id²

Submitted: 21-01-2026; Accepted: 03-04-2026; Published: 10-04-2026

ABSTRAK

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan upaya penanggulangan yang berkelanjutan, termasuk bagi kelompok rentan seperti siswa sekolah dasar. BPBD Kabupaten Bandung melaksanakan Program Penanggulangan Bencana berupa sosialisasi dan edukasi kebencanaan di sekolah dasar. Namun, pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara merata dan menimbulkan ketimpangan implementasi antar sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Penanggulangan Bencana pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung dengan menggunakan teori implementasi program Rondinelli dan Cheema. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal dan bersifat insidental. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan antara BPBD dan sektor pendidikan, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam sistem pendidikan dasar. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan implementasi program penanggulangan bencana pada sekolah dasar serta menegaskan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan dan dukungan regulasi daerah untuk mendorong implementasi program yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Program, Penanggulangan Bencana, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Bandung Regency is an area with a high level of disaster vulnerability, thus requiring continuous disaster management efforts, including for vulnerable groups such as elementary school students. BPBD of Bandung Regency implements a Disaster Management Program through disaster awareness socialization and education activities in elementary schools. However, the implementation of this program has not been evenly conducted, resulting in disparities in implementation among schools. This study aims to analyze the implementation of the Disaster Management Program for elementary school students in Bandung Regency using the program implementation theory proposed by Rondinelli and Cheema. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results show that the program implementation has not been optimal and tends to be incidental. This condition is mainly influenced by weak institutional coordination between BPBD and the education sector, limited implementing resources, and the absence of local regulations that specifically integrate disaster management into the elementary education system. These findings indicate disparities in the implementation of the disaster management program in elementary schools and highlight the importance of strengthening institutional coordination and local regulatory support to promote a more systematic and sustainable program implementation.

Key word: Program Implementation, Disaster Management, Elementary School

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa alam maupun non alam yang dapat disebabkan oleh perilaku manusia ataupun alam yang memiliki potensi untuk merugikan kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor tidak wajar yang menimbulkan kerugian bagi manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta serta memberikan dampak psikologis bagi korban.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga 9 Agustus 2025 telah terjadi 2.139 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,25%, seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta kekeringan. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, dengan korban meninggal dunia mencapai 315 orang dan lebih dari 4,6 juta jiwa terdampak. Tingginya frekuensi kejadian ini menunjukkan bahwa bencana merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi geografis berupa cekungan yang dikelilingi pegunungan serta dilalui oleh Sungai Citarum menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. Dalam lima tahun terakhir, tercatat 492 kejadian bencana di Kabupaten Bandung, dengan dominasi bencana tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Tingginya tingkat kerawanan ini menuntut adanya upaya penanggulangan bencana yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Penanggulangan bencana merupakan bagian penting dalam siklus penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan (Dwiningrum et al., 2025). Dalam perspektif manajemen bencana, perencanaan yang matang pada tahap pra-bencana menjadi kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas respons (Alexander, 2015). Dalam konteks ini, pendidikan kebencanaan menjadi salah satu strategi mitigasi non-struktural yang efektif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Pendidikan kebencanaan berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan melalui pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan menghadapi bencana (Tahmidaten & Krismanto, 2019). Selain itu, (Ronan et al., 2015) menekankan bahwa edukasi kebencanaan pada anak dapat membantu mengurangi kerentanan serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap risiko bencana.

Sekolah dasar sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak dini. Namun, implementasi pendidikan kebencanaan di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan integrasi dalam kurikulum, kurangnya pelatihan bagi guru, serta minimnya kegiatan simulasi yang berkelanjutan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual penanggulangan bencana telah menjadi perhatian dalam kebijakan publik, implementasinya di tingkat lokal, khususnya pada sektor pendidikan dasar, belum berjalan optimal. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh faktor pelaksana, sumber daya, serta koordinasi antaraktor yang terlibat (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya mengkaji penanggulangan bencana dari aspek konseptual, kebijakan, atau implementasi secara umum pada masyarakat. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi program penanggulangan bencana pada siswa sekolah dasar, terutama dalam konteks pemerataan pelaksanaan program di tingkat lokal, masih terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung belum mengkaji secara mendalam bagaimana faktor kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi antarorganisasi memengaruhi ketimpangan implementasi program di lapangan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi terkait analisis implementasi program penanggulangan bencana pada sektor pendidikan dasar secara lebih kontekstual dan empiris.

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan program penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bandung di sekolah dasar masih bersifat insidental dan belum terencana secara sistematis. Kegiatan sosialisasi dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak sekolah, dengan evaluasi yang belum terstruktur. Selain itu, tidak seluruh sekolah memperoleh akses yang sama terhadap program tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan implementasi antar sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan pada aspek efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program penanggulangan bencana belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok sasaran secara merata, meskipun secara normatif kebijakan telah tersedia. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas upaya penanggulangan bencana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program, khususnya pada tingkat

sekolah dasar sebagai kelompok strategis dalam pembangunan kesiapsiagaan bencana jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Penanggulangan Bencana pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung dengan menggunakan perspektif teori implementasi program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana di sektor pendidikan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan merata di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi Program Penanggulangan Bencana pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung. (Creswell & Creswell, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung. Lokasi penelitian meliputi BPBD Kabupaten Bandung dan beberapa sekolah dasar yang menjadi sasaran kegiatan program.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur BPBD Kabupaten Bandung, kepala sekolah, dan guru sekolah dasar yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi:

1. Pihak BPBD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana,
2. Kepala sekolah yang pernah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan
3. Guru yang mengikuti atau mendampingi kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana.

Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program di BPBD Kabupaten Bandung serta guru sekolah dasar, observasi pelaksanaan kegiatan, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2022).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara (interview guide) yang disusun berdasarkan fokus penelitian, lembar observasi untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, data program, dan arsip terkait implementasi program penanggulangan bencana. Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan dan menafsirkan data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi agar

diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Hardani MSI et al., 2020). Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses implementasi program serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Miles & Huberman, 1994).

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti BPBD, kepala sekolah, dan guru. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula teknik member check untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang disampaikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tupoksi dalam (Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 131 Tahun 2021, n.d.) sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, BPBD Kabupaten Bandung menyelenggarakan Program penanggulangan bencana untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang membagi upaya mitigasi ke dalam dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural bersifat fisik, seperti pembangunan sarana dan prasarana pengendalian bencana, sedangkan mitigasi non-struktural lebih menekankan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kebencanaan. Kegiatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan bagian dari mitigasi non-struktural, khususnya melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana.

Pada dasarnya program ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari Program Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawab seluruh BPBD sebagai perangkat daerah. Kegiatan tersebut berada di bawah Program Penanggulangan Bencana, yang secara

hierarkis dalam perencanaan anggaran daerah dikategorikan sebagai program. Penyelenggaraan program penanggulangan bencana dilatarbelakangi oleh kondisi geografis dan topografis Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang beragam, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya penanggulangan yang bersifat preventif, salah satunya melalui edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Kelompok anak usia sekolah dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan peningkatan kapasitas sejak dini, sehingga sekolah menjadi salah satu sasaran strategis dalam pelaksanaan program ini.

Perkembangan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada ruang lingkup tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bandung, berdasarkan rincian tugas dan fungsinya telah memfasilitasi hal tersebut. adapun SPM BPBD Kabupaten Bandung terdapat pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Jenis Pelayanan Dasar Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, 2018). Untuk realisasi pencapaian SPM BPBD pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pencapaian Satuan Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang terdampak bencana sejumlah 500.000 jiwa	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang terdampak bencana sejumlah 250.000	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang terdampak bencana sejumlah 170.000	100%

Sumber: Laporan Tahunan BPBD 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), BPBD Kabupaten Bandung secara administratif telah memenuhi seluruh indikator pelayanan dasar penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 100 persen. Capaian tersebut mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Secara

normatif, data ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar penanggulangan bencana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pencapaian SPM tersebut belum sepenuhnya merefleksikan pemerataan implementasi program di tingkat kelompok sasaran, khususnya pada satuan pendidikan dasar. Dalam praktiknya, pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana oleh BPBD Kabupaten Bandung yang menasar sekolah dasar sebagai kelompok strategis belum dilakukan secara merata. Sekolah dasar dipilih sebagai sasaran karena peserta didik pada jenjang ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko bencana serta keterbatasan dalam memahami situasi darurat dan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga memerlukan edukasi penanggulangan bencana yang terarah dan berkelanjutan.

Sekolah dasar memiliki peran strategis sebagai institusi pendidikan formal dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku kesiapsiagaan bencana melalui lingkungan pembelajaran yang terstruktur. Namun, hasil wawancara dan data pelaksanaan program menunjukkan bahwa belum seluruh sekolah dasar di Kabupaten Bandung memperoleh kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana secara langsung. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya indikator kebijakan yang secara spesifik mengatur sasaran pelayanan pada sektor pendidikan, sehingga pelaksanaan program masih bersifat umum dan sangat bergantung pada inisiatif serta tingkat kesadaran masing-masing sekolah. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara capaian kebijakan secara administratif sebagaimana tercermin dalam tabel SPM dengan realitas implementasi program penanggulangan bencana di tingkat sekolah dasar.

Di Kabupaten Bandung, sekolah dasar tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik lingkungan yang berbeda-beda, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana. Perbedaan kondisi lingkungan tersebut menyebabkan tingkat kerentanan sekolah terhadap bencana juga bervariasi. Dalam konteks tersebut, program sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung diarahkan untuk memberikan pemahaman dasar yang bersifat umum dan aplikatif, sehingga dapat digunakan oleh peserta didik dalam berbagai kondisi lingkungan sekolah. Berdasarkan data pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bandung, sepanjang tahun 2025 kegiatan penanggulangan bencana pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan simulasi bencana. Kegiatan tersebut tersebar di sejumlah sekolah dasar dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, baik di kawasan perkotaan

maupun wilayah dengan potensi ancaman bencana.

Pada tahun 2025, BPBD Kabupaten Bandung melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi di satuan pendidikan dasar, antara lain di Sekolah Islam Al-Haq Desa Margahayu Selatan, Lapangan SD Islam Bakti Asri, serta Islamic School Mutiara Embun Pagi. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan di SD Al Fath pada Oktober 2025 dan di TK/SD Mutiara Embun Pagi pada September 2025. Jumlah peserta yang terlibat dalam setiap kegiatan bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan peserta, dengan jumlah terbesar tercatat pada kegiatan pelatihan dan simulasi di Sekolah Islam Al-Haq yang melibatkan sekitar 900 peserta. Meskipun kegiatan penanggulangan bencana di satuan pendidikan dasar telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, sebaran kegiatan tersebut belum mencakup seluruh sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Kegiatan cenderung terfokus pada sekolah-sekolah tertentu yang telah memiliki komunikasi atau kerja sama dengan BPBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan bencana di sektor pendidikan masih bersifat insidental dan belum terencana secara sistematis dengan cakupan wilayah yang merata.

Meskipun data menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan di beberapa sekolah dasar, secara kuantitatif cakupan program masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah total sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Selain itu, belum adanya indikator kinerja yang secara spesifik mengukur tingkat kesiapsiagaan siswa setelah mengikuti kegiatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan program masih lebih berorientasi pada output (jumlah kegiatan) dibandingkan outcome (perubahan kapasitas siswa). Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan efektivitas substantif program di lapangan.

Data pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung bersifat fleksibel dan tidak secara eksklusif ditujukan kepada siswa sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga mencakup berbagai jenjang pendidikan, seperti taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, hingga satuan pendidikan berbasis komunitas, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan permintaan dari masing-masing satuan pendidikan. Fleksibilitas ini mencerminkan pendekatan adaptif BPBD Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada sekolah dasar karena peserta didik pada jenjang ini dinilai memiliki tingkat kerentanan yang

lebih tinggi terhadap risiko bencana serta membutuhkan edukasi kebencanaan sejak dini. Variasi jumlah peserta dalam setiap kegiatan Program Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya perbedaan kapasitas sekolah, luas cakupan kegiatan, serta metode penyampaian informasi yang diterapkan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kegiatan belum sepenuhnya bersifat seragam dan masih menyesuaikan dengan kondisi serta kesiapan masing-masing sekolah sebagai sasaran pelayanan. Pemilihan sekolah dasar sebagai fokus kajian juga didasarkan pada pertimbangan bahwa jenjang ini merupakan tahap awal pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, Program Penanggulangan Bencana yang diberikan pada tingkat sekolah dasar memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesiapsiagaan individu, sekaligus menjadi dasar penguatan budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. Pelaksanaan Simulasi Penyelamatan Diri dari Bencana Alam

Sumber: Data Lapangan BPBD 2025

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan pelaksanaan kegiatan simulasi penyelamatan diri dari bencana gempa bumi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung di lingkungan sekolah dasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi dasar kebencanaan yang disertai dengan praktik sederhana di dalam ruang kelas. Simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa mengenai langkah-langkah penyelamatan diri yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, khususnya pada situasi saat proses pembelajaran berlangsung.

Pelaksanaan simulasi di dalam kelas menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa sekolah dasar. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dan komunikatif oleh petugas BPBD agar mudah dipahami oleh peserta didik. Hal ini mencerminkan upaya BPBD dalam menyesuaikan

pendekatan penanggulangan bencana dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan sasaran program.



Gambar 2. Pelaksanaan Simulasi Penyelamatan Diri dari Bencana Alam

Sumber: Data Lapangan BPBD, 2025

Berdasarkan gambar 4.5 menggambarkan pelaksanaan simulasi penyelamatan diri dari bencana gempa bumi yang dilakukan di luar ruang kelas. Kegiatan ini menitikberatkan pada praktik langsung evakuasi dan respons darurat yang harus dilakukan siswa ketika terjadi bencana. Simulasi di area terbuka memberikan pengalaman nyata kepada siswa mengenai prosedur evakuasi, titik kumpul, serta pentingnya mengikuti arahan petugas dalam situasi darurat. Pelaksanaan simulasi di luar kelas menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menekankan aspek praktik dan pembiasaan. Melalui simulasi ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami konsep kebencanaan, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah penyelamatan diri secara lebih terstruktur apabila terjadi bencana di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di sekolah dasar, keterlibatan pihak sekolah menjadi faktor pendukung yang penting. Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pendamping selama kegiatan berlangsung serta sebagai penghubung antara BPBD dengan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dasar tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai mitra dalam implementasi program penanggulangan bencana. Dengan demikian, sekolah dasar dapat dipandang sebagai sasaran yang strategis dalam pelaksanaan program sosialisasi penanggulangan bencana.

Analisis implementasi program dalam penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Penanggulangan Bencana pada Siswa Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan bencana nonstruktural yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

kesadaran, dan kesiapsiagaan siswa sekolah dasar terhadap potensi bencana. Untuk memahami bagaimana kegiatan pelatihan pelayanan informasi rawan bencana tersebut diimplementasikan di lapangan, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menggambarkan proses pelaksanaan program secara komprehensif. Implementasi program tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga mencakup kesesuaian program dengan kondisi lingkungan, pola koordinasi antarpihak yang terlibat, kapasitas pelaksana program, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi program menurut Rondinelli sebagai kerangka analisis dalam mengkaji implementasi program penanggulangan bencana pada siswa sekolah dasar. Teori ini memandang implementasi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga relevan untuk digunakan dalam menganalisis pelaksanaan program penanggulangan bencana yang melibatkan banyak aktor dan dilaksanakan pada lingkungan yang beragam. Adapun hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Rondinelli dan Cheema, kondisi lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kondisi lingkungan dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya kondusif dan bersifat heterogen. Meskipun Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi, kondisi tersebut belum secara konsisten diikuti oleh kesiapan lingkungan sekolah dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan.

Dari aspek lingkungan institusional, implementasi program masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan inisiatif masing-masing sekolah. Pelaksanaan kegiatan belum didasarkan pada pemetaan kerawanan wilayah maupun perencanaan kebijakan yang sistematis, melainkan bersifat responsif terhadap permohonan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan institusional sekolah belum terintegrasi secara optimal dalam sistem implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

Lingkungan sosial sekolah juga menunjukkan variasi persepsi risiko yang memengaruhi penerimaan dan prioritas terhadap program. Sekolah di wilayah rawan bencana cenderung memiliki kesadaran risiko yang lebih tinggi, sementara sekolah di wilayah yang relatif aman menunjukkan persepsi risiko yang lebih rendah

sehingga penanggulangan bencana belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Perbedaan persepsi ini memperkuat karakter implementasi yang selektif dan tidak merata. Selain itu, keterbatasan lingkungan fisik sekolah, seperti minimnya ruang terbuka dan fasilitas pendukung simulasi, membatasi penerapan prosedur penanggulangan bencana secara optimal. Dari sisi lingkungan ekonomi dan sumber daya, keterbatasan anggaran, fasilitas, serta ketiadaan modul dan mekanisme pembinaan berkelanjutan menyebabkan sekolah bergantung pada dukungan BPBD dan belum mampu mengembangkan program secara mandiri. Kondisi ini diperkuat oleh lingkungan kebijakan daerah yang belum memberikan landasan regulatif yang mengikat bagi seluruh satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, dimensi kondisi lingkungan menunjukkan bahwa implementasi Program Penanggulangan Bencana di sekolah dasar Kabupaten Bandung berjalan secara adaptif dan situasional, namun belum terintegrasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam kerangka Rondinelli dan Cheema, kondisi lingkungan yang belum kondusif ini menjelaskan mengapa capaian implementasi program masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada kesiapan lingkungan sekolah sebagai sasaran kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan implementasi kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya menuntut peningkatan kapasitas aktor pelaksana, tetapi juga penataan kondisi lingkungan sasaran secara institusional, sosial, dan kebijakan.

Temuan pada dimensi kondisi lingkungan menunjukkan bahwa implementasi program belum didukung oleh kesiapan lingkungan yang seragam, sehingga menghasilkan pola pelaksanaan yang tidak merata. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, kondisi ini menandakan bahwa faktor eksternal belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan, sehingga implementasi cenderung bersifat reaktif daripada terencana. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya integrasi antara pemetaan risiko bencana dengan perencanaan program, agar implementasi tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi berbasis kebutuhan dan tingkat kerawanan wilayah secara objektif.

2. Hubungan Antarorganisasi

Dalam kerangka implementasi kebijakan menurut Rondinelli dan Cheema, hubungan antarorganisasi merupakan dimensi penting yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program lintas sektor. Hubungan antarorganisasi tidak hanya mencakup koordinasi formal, tetapi juga kejelasan pembagian peran, keselarasan kewenangan, serta mekanisme kerja bersama antaraktor yang terlibat. Program lintas sektor seperti Program Penanggulangan Bencana berpotensi mengalami hambatan implementasi apabila hubungan antarorganisasi tidak dibangun

secara terstruktur dan terlembagakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana di sekolah dasar Kabupaten Bandung telah terbentuk, namun masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis. Aktor utama yang terlibat meliputi BPBD Kabupaten Bandung sebagai pelaksana teknis program, Dinas Pendidikan sebagai pemegang kewenangan administratif di sektor pendidikan, serta sekolah dasar sebagai sasaran implementasi. Meskipun memiliki peran yang saling berkaitan, hubungan antaraktor tersebut belum didukung oleh kerangka kebijakan daerah yang mengatur koordinasi lintas sektor secara jelas. Koordinasi antarorganisasi cenderung bersifat pasif dan reaktif, di mana pelaksanaan program sangat bergantung pada inisiatif sekolah. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan kewenangan antara kapasitas teknis BPBD dan kewenangan administratif Dinas Pendidikan. Dalam praktiknya, BPBD belum memiliki ruang kelembagaan yang kuat untuk memastikan pemerataan implementasi program di seluruh sekolah dasar, sementara Dinas Pendidikan belum berperan optimal sebagai penghubung strategis antara kebijakan penanggulangan bencana dan sistem pendidikan dasar.

Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, kondisi tersebut mencerminkan implementasi kebijakan yang masih berjalan secara sektoral. Ketiadaan mekanisme integrasi lintas organisasi menyebabkan Program Penanggulangan Bencana lebih diposisikan sebagai aktivitas insidental, bukan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang direncanakan dan berkelanjutan. Pola komunikasi antarorganisasi yang bersifat ad-hoc juga berdampak pada tidak meratanya distribusi implementasi program antar sekolah. Selain itu, hubungan antarorganisasi belum sepenuhnya mengintegrasikan sekolah sebagai mitra strategis. Sekolah masih berada pada posisi sebagai penerima program, tanpa dukungan mekanisme penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Ketiadaan pedoman teknis bersama maupun integrasi program ke dalam tata kelola sekolah menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi belum mencapai tahap pelembagaan.

Secara normatif, kebijakan nasional melalui konsep Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana telah menyediakan kerangka integrasi penanggulangan bencana dalam sistem pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka tersebut belum teroperasionalisasi secara efektif dalam hubungan antarorganisasi di tingkat daerah. Dengan demikian, hubungan antarorganisasi dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana di sekolah dasar Kabupaten Bandung masih berada pada tahap awal, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian tujuan program secara merata

dan berkelanjutan.

Hubungan antarorganisasi dalam implementasi program ini menunjukkan pola koordinasi yang belum terlembaga dan masih bersifat sektoral. Dalam kerangka Rondinelli dan Cheema, lemahnya integrasi antaraktor ini menghambat efektivitas implementasi karena tidak adanya keselarasan peran dan mekanisme kerja yang jelas. Implikasinya, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui kebijakan daerah yang mampu mengintegrasikan BPBD dan Dinas Pendidikan secara lebih sistematis agar program dapat dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan.

3. Sumber Daya

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Rondinelli dan Cheema, sumber daya merupakan dimensi fundamental yang menentukan kemampuan suatu kebijakan untuk diwujudkan secara efektif di tingkat implementasi. Sumber daya tidak hanya mencakup ketersediaan anggaran, tetapi juga meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, ketersediaan waktu, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan kebijakan dijalankan secara berkelanjutan. Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dan sumber daya yang tersedia berpotensi menghasilkan kesenjangan implementasi, di mana kebijakan tetap dijalankan, tetapi tidak mencapai tujuan substantif secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi implementasi Program Penanggulangan Bencana pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bandung. Jumlah personel yang tersedia relatif tidak sebanding dengan luas wilayah kerja serta banyaknya sekolah dasar yang menjadi sasaran program. Kondisi ini membatasi kapasitas BPBD untuk menjangkau seluruh sekolah secara merata dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada cakupan implementasi, tetapi juga berimplikasi pada kualitas pelaksanaan kebijakan. Program penanggulangan bencana yang menyasar lingkungan sekolah dasar menuntut pendekatan edukatif yang intensif, berulang, dan kontekstual. Namun, keterbatasan personel menyebabkan implementasi program cenderung bersifat singkat dan berorientasi pada penyampaian materi dasar, sehingga ruang untuk penguatan pemahaman, evaluasi, dan internalisasi kesiapsiagaan bencana menjadi terbatas.

Keterbatasan sumber daya juga tercermin pada aspek sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program

sangat bergantung pada fasilitas yang tersedia di masing-masing sekolah. Ketiadaan sarana pendukung yang terstandarisasi menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara adaptif dan situasional. Dalam kerangka Rondinelli dan Cheema, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya fisik dapat membatasi kualitas hasil kebijakan, karena tujuan pembelajaran praktis dan penguatan kesiapsiagaan tidak sepenuhnya dapat dicapai secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor struktural yang memengaruhi pemerataan implementasi program. Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah membatasi kemampuan BPBD untuk menjangkau seluruh sekolah dasar secara terencana dan berkelanjutan. Akibatnya, implementasi program dilakukan secara selektif, sehingga sebagian sekolah memperoleh akses yang lebih besar dibandingkan sekolah lainnya. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, keterbatasan sumber daya finansial ini memperkuat terjadinya kesenjangan implementasi dan menghambat pencapaian prinsip pemerataan dalam kebijakan publik.

Aspek waktu juga menjadi bagian dari keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas implementasi. Waktu pelaksanaan program yang relatif terbatas belum sebanding dengan tujuan jangka panjang kebijakan, yaitu pembentukan kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih cenderung berorientasi pada pencapaian *output* jangka pendek, sementara pembentukan *outcome* dan dampak jangka panjang belum menjadi fokus utama. Keterbatasan sumber daya tersebut berdampak pada rendahnya kapasitas sekolah untuk melanjutkan implementasi program secara mandiri. Sekolah belum didukung secara memadai melalui penyediaan panduan teknis, modul pembelajaran, maupun mekanisme penguatan kapasitas guru. Akibatnya, sekolah masih berada pada posisi sebagai penerima program dan belum berfungsi sebagai aktor implementasi yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum diarahkan untuk membangun kemandirian kelembagaan sasaran kebijakan.

Secara keseluruhan, dimensi sumber daya dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta waktu pelaksanaan saling berinteraksi dan membatasi efektivitas program. Dalam kerangka Rondinelli dan Cheema, kondisi ini menempatkan implementasi program pada tahap adaptif, di mana kebijakan tetap dijalankan di tengah keterbatasan, namun belum mencapai tingkat pelembagaan yang sistematis, merata, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah

dasar.

Keterbatasan sumber daya menjadi faktor kunci yang membatasi jangkauan dan kualitas implementasi program. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang luas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas akan menghasilkan implementasi yang bersifat parsial. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya optimalisasi alokasi sumber daya serta pengembangan model implementasi yang lebih efisien, seperti pelibatan sekolah sebagai agen penanggulangan mandiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap BPBD.

4. Karakteristik Lembaga

Dalam kerangka pemikiran Rondinelli dan Cheema, karakteristik lembaga pelaksana merupakan dimensi struktural yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga tidak hanya merujuk pada keberadaan organisasi secara formal, tetapi juga mencakup struktur kewenangan, kapasitas internal, pola hubungan kerja, budaya organisasi, serta kemampuan lembaga dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. Rondinelli dan Cheema menekankan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kapasitas teknis lembaga, legitimasi struktural, dan mekanisme kerja yang terkoordinasi secara institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Penanggulangan Bencana di sekolah dasar Kabupaten Bandung belum didukung oleh karakteristik kelembagaan yang terintegrasi secara sistematis. BPBD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis memiliki kapasitas substantif dalam bidang penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan operasional. Namun, secara struktural BPBD tidak memiliki kewenangan administratif langsung terhadap satuan pendidikan. Keterbatasan kewenangan ini menempatkan BPBD pada posisi yang cenderung responsif terhadap permintaan sekolah, bukan sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dan memastikan pemerataan serta keberlanjutan program di seluruh wilayah.

Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas teknis dan legitimasi struktural lembaga pelaksana. Meskipun BPBD memiliki kompetensi yang memadai, ketiadaan kewenangan lintas sektor yang mengikat menyebabkan implementasi program sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti inisiatif sekolah dan intensitas komunikasi informal. Akibatnya, Program Penanggulangan Bencana cenderung berjalan secara situasional dan belum terlembagakan dalam sistem pendidikan formal. Dinas Pendidikan, sebagai lembaga yang memiliki

kewenangan administratif atas sekolah dasar, secara ideal berperan sebagai penghubung struktural antara kebijakan penanggulangan bencana dan sistem pendidikan daerah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum dijalankan secara optimal. Dukungan Dinas Pendidikan terhadap implementasi program masih bersifat normatif dan belum disertai dengan pengaturan kelembagaan yang operasional dan mengikat.

Dalam kerangka Rondinelli dan Cheema, lemahnya fungsi koordinatif lembaga yang memiliki otoritas formal ini menunjukkan adanya kekosongan institusional dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Ketiadaan kerangka kelembagaan yang jelas antara BPBD dan Dinas Pendidikan berdampak pada karakteristik implementasi di tingkat sekolah. Sekolah dasar sebagai aktor pelaksana di tingkat operasional menunjukkan variasi karakteristik kelembagaan yang cukup signifikan. Sekolah dengan kepemimpinan yang responsif dan memiliki kepedulian terhadap isu keselamatan cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam program, sementara sekolah yang berorientasi pada pencapaian administratif dan akademik cenderung memandang penanggulangan bencana sebagai prioritas sekunder. Variasi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan orientasi kelembagaan sekolah berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan dan keberlanjutan implementasi program.

Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, perbedaan karakteristik kelembagaan di tingkat sekolah memperlihatkan bahwa nilai, prioritas, dan budaya organisasi internal merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Ketika penanggulangan bencana belum diposisikan sebagai bagian dari fungsi inti kelembagaan sekolah, maka program akan sulit diinternalisasi dan dilanjutkan secara berkelanjutan. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi Program Penanggulangan Bencana berjalan tidak merata, meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan dasar.

Aspek budaya organisasi antar lembaga juga tercermin dari belum adanya pedoman bersama atau standar operasional yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi antar aktor. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan implementasi program sangat bergantung pada komunikasi informal dan fleksibilitas individu pelaksana. Dalam teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan karakteristik kelembagaan yang masih bersifat personalistik, di mana keberhasilan program lebih ditentukan oleh komitmen individu dibandingkan oleh kekuatan sistem kelembagaan. Karakteristik kelembagaan yang belum terinstitusionalisasi juga tercermin dari rendahnya tingkat integrasi Program Penanggulangan Bencana ke dalam sistem manajemen sekolah. Program belum diakomodasi secara formal dalam

perencanaan sekolah, sehingga penanggulangan bencana belum dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kapasitas sekolah untuk mengembangkan praktik penanggulangan bencana secara mandiri dan memperkuat ketergantungan terhadap aktor eksternal.

Karakteristik kelembagaan yang belum terintegrasi menunjukkan bahwa implementasi program masih berada pada tahap awal dan belum terinstitusionalisasi. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, ketidaksinkronan antara kapasitas teknis dan kewenangan struktural menjadi hambatan utama dalam mencapai implementasi yang efektif. Implikasinya, diperlukan penguatan kerangka kelembagaan yang mampu menghubungkan kewenangan administratif dan kapasitas teknis secara lebih sinergis agar program dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Penanggulangan Bencana pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan merata. Ditinjau dari dimensi kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya, dan karakteristik lembaga, terdapat kecenderungan bahwa implementasi masih bersifat adaptif, sektoral, dan bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, terutama dalam hal integrasi kelembagaan, pemerataan sasaran, serta dukungan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, perencanaan berbasis risiko, serta pengembangan kapasitas kelembagaan agar implementasi program dapat berjalan secara lebih sistematis, merata, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Penanggulangan Bencana pada sekolah dasar oleh BPBD Kabupaten Bandung belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Meskipun secara normatif program telah dilaksanakan dan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaannya di tingkat sekolah dasar masih bersifat parsial, adaptif, dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah.

Analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Rondinelli dan Cheema menunjukkan bahwa keterbatasan kondisi lingkungan, lemahnya hubungan antarorganisasi, keterbatasan sumber daya, serta karakteristik kelembagaan yang belum terintegrasi menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian implementasi program. Lingkungan sekolah yang heterogen,

perbedaan persepsi risiko, serta ketiadaan regulasi daerah yang mengikat menyebabkan program belum mampu menjangkau seluruh sekolah dasar secara merata. Selain itu, hubungan antarorganisasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, dan sekolah dasar belum terlembaga secara sistematis. Koordinasi yang masih bersifat reaktif dan tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas menghambat pemerataan dan kesinambungan program. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, dan waktu pelaksanaan turut memperkuat pola implementasi yang berorientasi pada kegiatan jangka pendek, tanpa disertai penguatan kapasitas sekolah sebagai pelaksana berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi Program Penanggulangan Bencana di sekolah dasar Kabupaten Bandung belum mencapai tahap institusionalisasi dalam sistem pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis pelaksana, tetapi juga oleh dukungan lingkungan, integrasi kelembagaan lintas sektor, kecukupan sumber daya, serta keberadaan kebijakan daerah yang mampu menjamin konsistensi dan keberlanjutan program di lingkungan sekolah dasar.

Secara praktis, penelitian ini menekankan perlunya penguatan kebijakan daerah yang mengintegrasikan program BPBD dengan sektor pendidikan dasar melalui regulasi dan koordinasi lintas sektor. Perencanaan berbasis pemetaan risiko serta pelatihan guru sebagai agen penanggulangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan program. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian administrasi publik dengan menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi faktor lingkungan, kelembagaan, dan sumber daya, sekaligus memperkuat relevansi teori Rondinelli dan Cheema dalam konteks penanggulangan bencana di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, D. E. (2015). *Disaster and emergency planning for preparedness, response, and recovery*. Oxford University Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Edukasi Bencana Sejak Dini*.
- Creswell, J., & Creswell, D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methods*.
- Dwiningrum, S. I. A., Siasah, M., Respati, D., & Sujoko. (2025). *Sosialisasi Pendidikan Mitigasi Pada Lingkungan Rawan Bencana*.
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>

-
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 131 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Jenis Pelayanan Dasar Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2018).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*.
- Ronan, K. R., Alisic, E., Towers, B., Johnson, V. A., & Johnston, D. M. (2015). Disaster Preparedness for Children and Families: a Critical Review. In *Current Psychiatry Reports* (Vol. 17, Number 7, pp. 1–9). Current Medicine Group LLC 1. <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0589-6>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2019). Implementasi Pendidikan Kebencanaan di Indonesia (Sebuah Studi Pustaka tentang Problematika dan Solusinya). *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 10(2), 136–154. <https://doi.org/10.31849/lectura.v10i2.3093>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2007).